

Peran *Public Libraries* dalam Model Literasi Politik Bagi Masyarakat

Role of Public Libraries in Political Literacy Model for Society

Albertoes Pramoekti Narendra

Article submitted
2018-12-17

Gamaliel Airlanda
Editor decision submitted
2019-02-13

Abstraksi

Tulisan ini membahas mengenai peran perpustakaan umum dalam program literasi politik dengan menggunakan metode kajian literatur dari berbagai sumber. Data yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan bidang politik dan kewarganegaraan di Indonesia. Dampak dari adanya kesenjangan pengetahuan bidang politik dan kewarganegaraan menyebabkan masyarakat mudah untuk dikendalikan oleh berbagai faktor eksternal yang terkadang bertujuan untuk hal yang bersifat negatif, dan untuk mengurangi kesenjangan tersebut diperlukan upaya pembelajaran secara terbuka agar masyarakat semakin mengetahui perannya sebagai warga negara. Perpustakaan Umum memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui berbagai program literasi atau pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan Umum dituntut untuk mengambil bagian dalam program literasi politik agar warga negara memiliki pengetahuan dan memiliki sikap dalam menentukan pilihan politik. Hasil kajian menunjukkan ada beberapa model literasi politik yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan Umum dalam rangka pembelajaran politik dan kewarganegaraan bagi semua lapisan masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain (1) Perpustakaan perlu lebih proaktif dalam membangun jejaring dengan berbagai pihak sehingga menjadi tempat sumber pembelajaran masyarakat dengan berbagai subyek (2) Perpustakaan

mengembangkan program kegiatan literasi dalam berbagai bidang dan mengenali dengan cermat masyarakat yang akan memanfaatkan program literasi tersebut agar dapat bermanfaat.

Abstract

This paper discusses the role of public libraries in political literacy programs. This paper uses literature review methods from various sources. The data shows that there is still a knowledge gap in the political and citizenship fields in Indonesia. The impact of knowledge gaps in politics and citizenship makes it easy for people to be controlled by a variety of external factors which sometimes aim for negative things, and to reduce these gaps requires open learning so that people increasingly know their role as citizens. The Public Library has the duty to educate people's lives through various literacy programs or learning for the community. The Public Library is required to take part in political literacy programs so that citizens have knowledge and have an attitude in determining political choices. The results of the study show that there are several political literacy models that can be carried out by the Public Library in the context of political learning and citizenship for all levels of society. Recommendations that can be given include (1) Libraries need to be more pro-active in building networks with various parties so that they become a source of learning for people with various subjects. (2) The library develops literacy activities in various fields and carefully recognizes people who will use literacy programs. so that it can be useful.

Keywords: *Political Literacy, Public Libraries.*

Latar Belakang

Di era informasi dewasa ini, masih didapati kesenjangan informasi bidang politik di masyarakat. *Republika* 15 September 2017 menyampaikan data bahwa 10,64 persen dari total jumlah penduduk atau sekitar 27,77 juta jiwa merupakan masyarakat miskin dan juga membutuhkan pendampingan dalam peningkatan pengetahuan khususnya bidang politik dan kewarganegaraan atau dengan istilah *IQ* politik (Saputra, 2017). Selain itu golongan masyarakat yang lain juga memerlukan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan politiknya. Data lain menyebutkan bahwa dalam tahun 2012 survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) menulis bahwa 79% anak muda Indonesia tidak tertarik dalam bidang politik

atau berpolitik (Hasanah, 2017). Secara lebih jelas dikatakan bahwa dalam kerangka penyelenggaraan negara yang makin demokratis, pendidikan mengenai demokrasi akan membuka ruang keterlibatan (*engagement space*) bagi seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas dengan membongkar sekat-sekat primordial seperti agama, etnis, kelas, gender, ras, untuk terlibat aktif dalam menentukan pilihan juga mempengaruhi kebijakan yang ada (Saputra 2017). Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya bersama agar pemahaman masyarakat tentang politik dan kewarganegaraan dari seluruh lapisan masyarakat yang sangat bervariasi dapat semakin meningkat. Literasi politik merupakan salah satu unsur penting dalam proses pelaksanaan demokrasi dan peningkatan pengetahuan kewarganegaraan masyarakat. Pemahaman masyarakat yang baik dalam menanggapi berbagai isu politik dan kewarganegaraan menjadi salah satu tujuan literasi politik. Dalam program literasi politik yang paling penting terkait dengan pemahaman kebangsaan dan kenegaraan masyarakat (Putri, 2015). Literasi politik perlu dimaknai sebagai satu usaha baik kajian secara tekstual maupun konteks sosial politik dalam rangka mewujudkan warga negara yang terdidik (*educated citizen*). Literasi politik merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan politik dan kerja kerja yang mengedepankan edukasi politik agar warga negara semakin memiliki kesadaran kritis serta memiliki partisipasi secara aktif dalam berbagai dinamika politik yang dapat dilakukan lebih efektif. Literasi politik harus disadari sebagai konsep yang bersifat evolutif dan membutuhkan waktu. Masyarakat tentu memerlukan pendampingan bagi penguatan kapasitas intelektual mereka dalam politik berikut juga dengan edukasi etika politik. Hal ini mengandung arti bahwa pendampingan ini menjadi tugas kita bersama (Saputra, 2017). *Public Libraries* atau Perpustakaan Umum sebagai salah satu institusi penyelenggara pembelajaran terbuka memiliki peranan untuk mencerdaskan masyarakat dalam berbagai bidang dengan menyelenggarakan program-program literasi yang dibutuhkan. *The Association of College and Research Library* (ACRL 2000) menulis bahwa kegiatan literasi politik dilandasi dengan pemahaman awal mengenai literasi informasi. Literasi informasi didefinisikan sebagai berikut, “*the ability to know when information is needed and to access, evaluate, and use information effectively and ethically*”. Dari definisi tersebut maka peran perpustakaan umum dalam pengembangan program literasi politik menjadi semakin jelas bahwa perpustakaan membimbing masyarakat dalam penelusuran, evaluasi dan pemanfaatan informasi secara efektif dan etis. Peranan pengelola perpustakaan dalam mengembangkan program literasi politik juga dibutuhkan bagi masyarakat. Tulisan ini mendalami dengan metode kajian literatur terkait dengan (1) makna literasi politik, (2) mengenai tugas dan fungsi perpustakaan umum sebagai institusi penggerak berbagai program literasi bagi masyarakat, (3) upaya yang dapat dilakukan perpustakaan umum dalam pembelajaran sepanjang masa bidang politik dan kewarganegaraan.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di

dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan (Pohan dalam Prastowo, 2012). Dasar pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama maupun berbeda. (Ratna dalam Prastowo, 2012).

Pembahasan :

Kebutuhan informasi Politik dan Kewarganegaraan Masyarakat

Kajian ini lebih dikenal sebagai *civic education*. *Civic education* atau pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu materi yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2012 City Club of Portland di AS terbit sebuah hasil penelitian yang dilakukan mengenai pentingnya kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ada 3 hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pemahaman politik dan kewarganegaraan mereka. Tiga hal tersebut adalah :

1. Pengetahuan dasar kewarganegaraan (*Basic Civic Knowledge*). Menurut riset tersebut unsur ini dapat dipenuhi dari berbagai literatur tentang kewarganegaraan dan politik yang diperoleh khususnya literatur kewarganegaraan yang berlaku di AS.
2. Pengetahuan dan kemampuan untuk berfikir kritis (*critical thinking skills*). Keterampilan ini perlu dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi ataupun menghalau berbagai kabar bohong, *hoax*, *miss information*, *argument* yang tidak menggunakan fakta dan logika. Banyak kasus bahwa masyarakat yang rendah daya fikir kritisnya menjadi mangsa atau korban dari berbagai berita yang tidak benar.
3. Kecenderungan melakukan aksi / tindakan atas nama warga negara dan pengetahuan menjadi warga negara yang aktif; artinya bagaimana setiap warga negara mengekspresikan yang disaksikan / diamati, kepada siapa ekspresi itu akan disampaikan. Serta bagaimanakah pengaruhnya bagi perkembangan pengetahuan politik warga masyarakat.
4. Secara terus menerus mengembangkan proses pembelajaran politik dan kewarganegaraan masyarakat.

Kebutuhan informasi yang juga terkait dengan informasi politik dapat ilustrasikan bahwa senantiasa ada jarak antara pengetahuan yang ingin dicapai dengan pengetahuan yang dimiliki. Demikian halnya dengan kebutuhan informasi terkait dengan politik dan kewarganegaraan dimana setiap masyarakat tidak dapat bertemu dengan berbagai tokoh politik yang mengatur atau mengelola kehidupan masyarakat di suatu bangsa.

Jika diamati secara lebih nyata dalam kehidupan di masyarakat, pendidikan politik dan kewarganegaraan diberikan dari mulai bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun apakah setelah menamatkan bangku perguruan tinggi masyarakat tidak lagi membutuhkan pendidikan politik dan kewarganegaraan? Bagaimana pula halnya dengan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan

hingga perguruan tinggi? Bagaimanakah mereka dapat selalu melakukan update pengetahuan terkait dengan politik dan kewarganegaraannya? Itu semua merupakan tugas dari semua lapisan masyarakat untuk terus mau belajar.

Pembelajaran politik dan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tujuan pembelajaran ini sebagai tambahan pengetahuan dan diimplemetasikan dalam hidup sehari-hari warga negara. Salah satu metode pembelajaran yaitu menggunakan metode kontekstual.

Perpustakaan mengemban fungsi Literasi Politik

Public Libraries atau dikenal sebagai perpustakaan umum mengemban tugas dan fungsi yang sangat luas bagi upaya pembelajaran sepanjang masa untuk seluruh masyarakat. Dalam perkembangan era informasi dan industri yang semakin pesat, perpustakaan mengemban tugas untuk memperdalam tugas dan fungsi mengembangkan kemampuan warga negara dalam berbagai kemampuan atau dikenal sebagai literasi. Perpustakaan menjadi pusat dalam pengembangan pembelajaran berbagai jenis literasi yang berkembang dalam era informasi ini. Setidaknya ada 9 kemampuan atau literasi yang perlu dikembangkan oleh *public libraries* yaitu (1) *Digital Literacy* (2) *Computer Literacy* (3) *Media Literacy* (4) *Information Literacy* (5) *Technology Literacy* (6) *Political Literacy* (7) *Cultural Literacy* (8) *Multicultural Literacy* (9) *Visual Literacy*. (Garcia, 2013)

Dalam kerangka pembelajaran di luar ruang kelas, salah satu lembaga yang mampu melaksanakan fungsi itu adalah perpustakaan. Di dalam perpustakaan tersedia berbagai bacaan dengan berbagai subyek pengetahuan. Perpustakaan umum / *public libraries* merupakan salah satu institusi yang bisa melaksanakan tugas untuk mencerdaskan masyarakat saat mereka tidak lagi duduk dibangku sekolah atau memang tidak memiliki kemampuan untuk mengenyam pendidikan formal. Demikian pula dalam pembelajaran bidang politik dan kewarganegaraan. Perpustakaan umum memiliki keunggulan dapat dikunjungi oleh siapapun juga dari berbagai latar belakang status sosial, golongan serta tidak memberikan peraturan yang berbeda dalam pelayanannya. Dari situasi tersebut maka *Public Libraries* / Perpustakaan Umum merupakan satu satunya institusi yang mampu menyelenggarakan proses pembelajaran politik dan kewarganegaraan bagi semua lapisan masyarakat secara terus menerus.

Hal hal positif yang dimiliki perpustakaan umum dalam mengembangkan kegiatan literasi politik antara lain :

1. Terbuka untuk siapa saja dari berbagai lapisan masyarakat; perpustakaan terbuka dikunjungi oleh siapa saja segenap masyarakat. Juga warga Negara asing yang sedang berkunjung dalam Negara boleh mengunjungi perpustakaan untuk membaca berbagai koleksi dan pengetahuan yang dimiliki. Satu satunya lembaga yang terbuka terhadap semua orang adalah perpustakaan umum. Di Indonesia perpustakaan umum terdapat di kecamatan, kota kabupaten/kotamadya, kota propinsi.
2. Berorientasi pada pembelajaran; dengan menyangand lifelong learning maka perpustakaan merupakan satu satunya lembaga yang mendidik masyarakat dengan tidak terbatas waktu. Masyarakat boleh menggunakan perpustakaan

- mulai dari usia dini sampai usia lanjut. Koleksi yang dimiliki pun koleksi yang mengarahkan agar masyarakat hidup lebih baik dan dapat meraih keberhasilan.
3. Memiliki beragam informasi yang baik dan mendidik; keunggulan yang lain adalah bahwa perpustakaan umum memang diisi oleh berbagai subyek ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan perpustakaan melayani seluruh kebutuhan informasi dari masyarakat di sebuah daerah.
 4. Mendidik, mencerdaskan, dan memiliki kepedulian pada masyarakat; perpustakaan umum merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk pendidikan non formal yang terbuka dan demokratis. Setiap kali berkunjung ke perpustakaan tentu ada hal baru yang didapatkan. Karena setiap saat koleksi perpustakaan juga diperbarui misalnya berbagai surat kabar yang dilanggan.
 5. Unggul dalam mendesain program; perpustakaan umum tentunya didesain oleh pemerintah untuk mampu melaksanakan berbagai program peningkatan pengetahuan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka perpustakaan umum mampu untuk memenuhi berbagai program penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 6. Ada banyak lokasi yang dimiliki; perpustakaan umum jika di Indonesia saat ini tersebar hingga ke kota kecamatan, sehingga masyarakat semakin dekat untuk mengakses pengetahuan dan saling berbagi pengetahuan di perpustakaan. Program kegiatan di perpustakaan pun juga semakin menyentuh lapisan masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.
 7. Bebas biaya; perpustakaan umum dibangun dan dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah wajib untuk membiayai seluruh penyelenggaraan perpustakaan umum karena tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan warga masyarakat.

Perpustakaan mengemban fungsi literasi politik artinya bahwa perpustakaan memiliki tugas dan fungsi menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan bagi aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik dan kewarganegaraan. Masyarakat yang membutuhkan beragam informasi mengenai subyek politik dan kewarganegaraan dapat memanfaatkan beragam koleksi perpustakaan. Selain menyediakan informasi, perpustakaan juga berkewajiban membimbing masyarakat dalam memperoleh sumber informasi yang benar dan baik terkhusus bidang politik dan kewarganegaraan, itulah salah satu fungsi dalam aktivitas Literasi politik.

Literasi politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga dan pengetahuan atau pemahaman ini disebut sebagai *political expertise* dan *political awareness*, yang intinya merujuk pada maksud sejauh mana seorang individu warga negara memberi perhatian dan memahami isu-isu politik dimana dalam kaitan ini setidaknya 4 (empat) elemen literasi politik. Yaitu : (1) kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan insitutsi politik, kewenangan, dan perannya (2) kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu *outcome*

politik; (3) pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik; (4) partisipasi dalam kegiatan politik. (Sutisna, 2015)

Partisipasi dan peran Perpustakaan dalam Pembelajaran Politik

Badan dunia UNESCO pada tahun 1994 mempublikasi sebuah dokumen terkait dengan keberadaan perpustakaan umum di semua negara. Publikasi tersebut dikenal dengan Manifesto Perpustakaan Umum. Dalam manifesto tersebut, Perpustakaan Umum memiliki 4 tujuan utama dalam pelayanan. Yaitu :

1. Memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik
2. Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat, terutama informasi mengenai topik yang berguna bagi mereka dan yang sedang hangat dalam kalangan masyarakat
3. Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya sejauh kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka yang berkesinambungan
4. Bertindak selaku agen cultural artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian perpustakaan umum bertugas menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya dengan cara menyeleggarakan pameran budaya, ceramah, pemutaran film budaya, dan penyediaan informasi yang dapat meningkatkan keikutsertaan, kegemaran, dan apresiasi masyarakat terhadap segala bentuk budaya.

Dari manifesto tersebut dapat dijelaskan bahwa perpustakaan umum sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang dilayani dalam sebuah negara. Dalam manifesto yang pertama dapat kita tarik pemahaman bahwa masyarakat yang semakin aktif membaca koleksi perpustakaan tentunya pengetahuan yang dimiliki akan bertambah.

Kajian kajian yang berkaitan tentang peranan perpustakaan umum juga terus berlangsung mengingat peranannya merupakan sumber belajar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada sekat- sekat. Salah satu kajian yang dikembangkan adalah peranan perpustakaan dalam mengembangkan sikap demokratis yang termasuk di dalamnya adalah tentang literasi politik

Sebuah artikel dengan judul *Democracy Requires Civic Engagement and Knowledge—What Libraries Can Do* menyatakan bahwa Perpustakaan Umum dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis dan berdasar pada pengelompokan tersebut perpustakaan berperan dalam mengembangkan kegiatan literasi politik bagi masyarakat (Cohen, 2017). Dari berbagai tipe perpustakaan tersebut disusunlah pemetaan kapasitas perpustakaan dalam mengemban tugas literasi politik dan kewarganegaraan. Pemetaan tersebut sangat penting agar dalam program pengembangan literasi politik ini tujuan perpustakaan untuk memberikan wawasan pengetahuan mengenai berbagai dinamika politik dan kewarganegaraan dalam

sebuah negara menjadi semakin jelas dan masyarakat memahami mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

A. Perpustakaan dengan skala kecil, program yang dilakukan antara lain :

1. Penyelenggara diskusi berbasis pada karya ilmiah atau artikel maupun buku mengenai kewarganegaraan, berpikiran kritis dan peristiwa kemasyarakatan paling mutakhir. Diskusi ini dapat mengundang tokoh maupun narasumber yang berkompeten dalam bidang politik dan kewarganegaraan. Sesuai diskusi berbagai catatan yang didapatkan sebagai hasil dari diskusi perlu untuk dipublikasikan. Catatan-catatan ini diolah sehingga menjadi sebuah deskripsi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Hasil dari kegiatan diskusi juga perlu untuk didistribusikan kepada stakeholder perpustakaan agar dikesempatan diskusi yang berikutnya mendapatkan tanggapan yang lebih baik lagi dari pelanggan perpustakaan. Pada umumnya perpustakaan belum membiasakan secara disiplin mencatat berbagai data dan hasil kegiatan yang dilaksanakan di dalam perpustakaan. Padahal sesungguhnya hasil kegiatan tersebut pada dasarnya sangat baik karena berasal dari narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya.
2. Memiliki daftar sejumlah sumberdaya untuk persiapan kegiatan berikutnya. Mengingat keterbatasan yang dimiliki tipe perpustakaan ini maka pengelola perpustakaan perlu untuk melakukan pendataan berbagai sumberdaya yang dimiliki, apabila sumberdaya yang dimiliki belum mencukupi maka perlu untuk berbagi sumberdaya dengan perpustakaan yang lebih besar maupun dengan sesama perpustakaan sejenis sehingga program-program kegiatan di perpustakaan dapat terselenggara.
3. Memulai konsep perpustakaan humanis. Perpustakaan umum dibangun oleh pemerintah dan tipe perpustakaan kecil ini memungkinkan untuk terjadi banyak interaksi antara pengelola dengan pelanggan perpustakaan. Dengan adanya interaksi ini maka suasana di perpustakaan yang kecil ini bagaikan dalam sebuah keluarga. Bukan hanya suasana belajar yang dibangun, tetapi juga kebersamaan lain yang lebih bersifat interaksi sosial antar manusia. Aktiviitas yang demikian ini juga merupakan tindakan konkret dalam kehidupan demokrasi, politik dan kewarganegaraan yang saling menghargai.

B. Perpustakaan dengan tipe menengah yang memiliki cukup staf dan sumberdaya lain dalam rangka pengembangan pembelajaran kewarganegaraan. Dalam perpustakaan tipe ini dapat pula dikembangkan berbagai kegiatan pengembangan pembelajaran politik dan kewarganegaraan antara lain :

1. Mengarahkan kepada aktivitas pendampingan masyarakat lokal khususnya bidang kewarganegaraan dan politik. Aktivitas ini diarahkan untuk mendampingi masyarakat apa yang dapat dilakukan namun juga memberikan pendampingan secara umum bagi siapapun. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh narasumber yang memang memiliki kompetensi dalam bidang politik dan kewarganegaraan serta didampingi oleh pengelola perpustakaan.

2. Menyediakan daftar sumberdaya mengenai berbagai informasi resmi pemilihan umum dan juga kampanye tentang penggunaan dana yang transparan sebagai salah satu mekanisme pemungutan suara.
 3. Apabila lokasi perpustakaan berdekatan dengan sebuah kampus atau perguruan tinggi khususnya yang memiliki program studi ilmu sosial dan politik maupun ilmu pendidikan, dapat dilakukan jalinan kerjasama untuk membicarakan topic politik dan kewarganegaraan yang mengundang para akademisi dari kampus tersebut.
 4. Perencanaan program kegiatan yang konsisten dan berkesinambungan mengenai topik-topik mengenai politik dan kewarganegaraan. Program ini dapat didesain selama satu tahun dengan berbagai kegiatan baik yang bersifat di dalam ruangan maupun luar ruangan. Program ini juga menghadirkan nara sumber yang memiliki kompetensi pengetahuan dalam bidang politik dan kewarganegaraan.
- C. Perpustakaan dengan tipe besar. Perpustakaan ini memiliki sumber daya yang sangat memadai, dengan fasilitas yang cukup lengkap dan modern, dukungan anggaran yang cukup serta menjadi rujukan bagi perpustakaan yang lebih kecil. Program literasi politik yang dapat dilaksanakan perpustakaan tipe ini antara lain :
1. Merencanakan dan menetapkan tema pokok yang menjadi panduan bagi perpustakaan yang lebih kecil dalam program kegiatan literasi politik di daerah masing-masing. Sehingga dari tema pokok ini akan muncul berbagai fenomena terkait dengan situasi politik dan kewarganegaraan dimasing-masing masyarakat.
 2. Menetapkan kebutuhan anggaran dari program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun serta berupaya membuat daftar sumberdaya yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan. Misalnya narasumber, sponsor yang tidak mengikat, dan media yang mempublikasikan kegiatan.
 3. Menyediakan sumber informasi terkait politik dan kewarganegaraan yang paling mutakhir yang menjadi sumber rujukan bagi perpustakaan yang lebih kecil.
 4. Mengarahkan program kegiatan kepada berbagai tema-tema yang menarik, khususnya bidang politik dan kewarganegaraan
 5. Mengarahkan dan menemukan berbagai potensi masyarakat yang muncul dari berbagai kegiatan kewarganegaraan dan membinanya sehingga dapat menjadi model bagi pengembangan program lanjutannya
 6. Mengarahkan dalam pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi yang benar dalam rangka pembelajaran bidang politik dan kewarganegaraan
 7. Mengembangkan modul instruksional khususnya bagi pustakawan agar semakin fokus dalam kajian spesifik yaitu "*Civics specialists*"
- Perpustakaan umum/*public libraries* memiliki kapasitas untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai isu-isu sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebagai institusi pembelajaran yang terbuka bahkan perpustakaan umum memiliki kesempatan dalam pengembangan salah satu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual ini selain melibatkan guru di dalam

kelas, pengembangannya dapat dilakukan baik oleh pengelola perpustakaan maupun pelanggan perpustakaan atau pengunjung perpustakaan.

Pendekatan pembelajaran kontekstual didasari oleh beberapa teori berikut (Sutisna, 2015):

- (1) Konstruktivisme Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Constructivism*). Teori ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar;
- (2) Pembelajaran Berbasis Usaha/Teori Pertumbuhan Kecerdasan (*Effort-Based Learning/Incremental Theory of Intellegence*). Teori menekankan pentingnya upaya keras untuk mencapai tujuan belajar yang akan memotivasi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan komitmen untuk belajar;
- (3) Sosialisasi (*Socialization*). Teori ini memandang, bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan tujuan belajar, oleh karenanya faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan selama perencanaan pengajaran; (4) Pembelajaran Situasi (*Situated Learning*).

Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus dikondisikan dalam fisik tertentu dan dalam konteks sosial (masyarakat, rumah, dsb) dalam mencapai tujuan belajar; (5) Pembelajaran Distribusi (*Distributed Learning*). Teori ini menekankan bahwa manusia merupakan bagian terintegrasi dari proses pembelajaran, oleh karenanya harus berbagi pengetahuan dan tugas-tugas pada individu lain serta lingkungan sekitar.

Program Pembelajaran Literasi Politik yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan Umum secara lebih konkrit diantaranya :

1. Workshop atau pelatihan mengenai pendidikan politik dan kewarganegaraan untuk generasi muda dan dewasa. Ada perbedaan perlakuan dalam kegiatan workshop ini generasi muda atau pemilih pemula memiliki karakter yang masih labil dan cenderung emosional dalam menentukan pilihan maupun dalam bersikap terhadap suatu keadaan sosial masyarakat. Dalam workshop ini juga mengangkat tema yang factual di masyarakat, mengumpulkan informasi informasi yang mendukung serta melakukan analisis terhadap berbagai situasi tersebut dan dikaji dengan teori maupun literatur yang ada. Dapat diawali dengan pertanyaan misalnya *what do you see here? What is missing?*
2. Aktivitas kemasyarakatan. Mengajak masyarakat untuk merubah sesuatu yang buruk untuk menjadi lebih baik. Dari hal yang paling sederhana mempelajari strategi untuk merubah pola perilaku warga Negara agar menjadi semakin baik. Misalnya dengan pendampingan untuk meraih keberhasilan, Belajar mendengarkan, tracking atau penelidikan isu politik/kewarganegaraan.
3. Melakukan kajian diskusi terhadap pengaruh percakapan politik dan konstitusi bagi masyarakat. Perpustakaan umum dapat melakukan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap berbagai tayangan percakapan politis dari para politisi dan realitas dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Membuat daftar catatan terhadap berbagai hal positif yang diperoleh serta hal negative yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Dari sumber literatur dan analisis penulis maka beberapa kesimpulan dapat penulis sampaikan :

1. Di era informasi saat ini kemampuan untuk meleak bidang politik atau dengan istilah literasi politik menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Informasi yang setiap hari diterima masyarakat perlu disaring, dikendalikan, dikelola oleh lembaga yang memiliki kompetensi mengelola informasi salah satunya perpustakaan
2. Di era informasi perpustakaan umum memiliki peran dan fungsi untuk melakukan berbagai kegiatan peningkatan kemampuan atau literasi dalam berbagai bidang agar masyarakat ada pihak yang mendampingi dalam memanfaatkan berbagai sumber informasi.
3. Perpustakaan umum merupakan lembaga milik pemerintah yang terbuka untuk dikunjungi masyarakat dari berbagai lapisan. Perpustakaan merupakan tempat belajar sepanjang hidup dan terbuka bagi semua usia. Oleh karena itu perpustakaan merupakan tempat belajar yang tidak mengenal batasan usia. Program pembelajaran apapun dapat dilaksanakan di perpustakaan umum.
4. Program literasi politik merupakan salah satu tugas perpustakaan bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak semuanya memahami atau mengerti tentang situasi politik dan kewarganegaraan. Literasi politik memiliki arti bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan serta dapat melaksanakan peran nya sebagai warga negara dalam berbagai kegiatan politik dan kewarganegaraan yang ada. Salah satu upayanya adalah mengundang siswa pemilih pemula dalam Pemilu untuk diberi pengetahuan mengenai sikap berpolitik sebagai warga negara. Program lain adalah mengundang tokoh atau nara sumber yang berkompeten dalam bidang politik dan kewarganegaraan untuk berdiskusi dengan masyarakat di aula perpustakaan umum.
5. Dalam mengembangkan program literasi politik pengelola perpustakaan umum perlu mengkhususkan seseorang staf untuk menjadi ahli yang terkait dengan tema kewarganegaraan dan politik *civic specialists*. Tugas yang diemban oleh profesi itu adalah mengembangkan berbagai program literasi politik dengan melibatkan tokoh yang memiliki kompetensi.
6. Perpustakaan mengembangkan berbagai model pembelajaran yang konkrit dan kontekstual terkait dengan literasi politik. Program program kegiatan diarahkan untuk membentuk dan membekali masyarakat dengan pengetahuan, pengalaman dan wawasan bidang politik dan kewarganegaraan. Sebagai contoh perpustakaan membuat modul belajar berupa poster, iklan, video berisi materi pembelajaran politik dan kewarganegaraan agar lebih bijaksana dalam menerima informasi yang terkadang mengandung unsur fitnah dan hasutan yang tidak berdasar. Tokoh atau figur yang dipercaya masyarakat perlu untuk diundang dalam pembelajaran politik dan kewarganegaraan secara berkala di perpustakaan umum.

Daftar Pustaka

- Association of College and Research Library (ACRL 2000). ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education. Retrieved from <https://acrl.ala.org/framework/>
- Cohen, D. (2017). Enhancing Civic Knowledge/Inspiring Political Engagement : The Role of Public Libraries in Civic Participation. *OLA Quarterly*, 23.2017 (1), 9-12. <https://doi.org/10.7710/1093-7374.1884>
- Echols, John. M dan Hassan S, 1989. *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: PT Gramedia.
- Garcia, Antero. (2013, May 10,) The Many Forms of Literacy. Retrieved from https://thecurrent.educatorinnovator.org/resource_section/the-many-forms-of-literacy
- Hasanah, Farida. (2017, August, 17) Anak Negeri Harus Melek Politik, Mengapa ? Retrieved from <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/20/anak-negeri-harus-melek-politik-mengapa>
- Karim, Abdul Gaffar dkk, (2015). "Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman", Laporan Penelitian, Sleman : JPP FISIPOL UGM dan KPU Kabupaten Sleman.
- Kemenristek Dikti RI. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Kemenristek Dikti. Retrieved from <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/riset/memahami-tingkat-melek-politik-warga-di-kabupaten-sleman>
- Prastowo, A. (2012)., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putri, Nora Eka. (2015). Peningkatan literasi politik melalui kebijakan berbasis gender di Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.VNo. 1 Tahun 2015*
- Sutisna, Agus. (2017) Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. Retrieved from jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/257-270
- Saputra, Mega. (2017, September, 15) Literasi Politik Tingkatkan IQ Politik Masyarakat Miskin. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/15/10/16/nasional/umum/12/03/29/jurnalisme-warga/wacana/17/09/14/ow9wat396-literasi-politik-tingkatkan-iq-politik-masyarakat-miskin>
- Sulistyo-Basuki (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia
- UNESCO Public Library Manifesto; (1995) - unesdoc. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001030/103075Mb.pdf>
- UNESCO (1994). The Public Library Manifesto. Retrieved from <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/libraries/unescoifla-library-manifestos/>
- Eurika Pendidikan. .(2014). Kajian Pustaka. Retrieved from <https://www.eurekapedidikan.com/2014/12/kajian-pustaka.html>

Albertoes Pramoekti Narendra, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Email: Alberto.pramukti@uksw.edu beetpram@gmail.com